



**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)**

TESIS

PUTRI SUKMIANI

1910622045

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah nyatakan dengan benar.

Nama : Putri Sukmiani

NIM : 1910622045

Tanggal : 28 November 2022

Bila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya siap dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 November 2022



PUTRI SUKMIANI

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI SUKMIANI
NRP : 1910622045
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 28 November 2022

Yang menyatakan,


PUTRI SUKMIANI

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : PUTRI SUKMIANI
NRP : 1910622045
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M
Ketua Penguji



Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH. MH.
Penguji I



Dr. Handoyo Prasetyo
Penguji II / Pembimbing



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M
Ka. Prodi



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 27-11-2022

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

PUTRI SUKMIANI

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan Mahkamah Agung telah memperluas kewenangan mutlak PTUN untuk memeriksa unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam menjalankan jabatannya. Namun kewenangan tersebut bukanlah satu-satunya pilihan yang diberikan oleh undang-undang di Indonesia, selain itu juga terdapat kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikan topik penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Oleh karena itu, masih terdapat ambiguitas dan tumpang tindih undang-undang terkait penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum dan keadilan bagi pihak terkait.

Jenis penelitian tesis yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menemukan bahwa PTUN berwenang memutus terkait unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah. Analisis Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 2/P/PW/2017/PTUN.JBI. tidak sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2015 karena tidak memenuhi syarat, pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan, setelah ada hasil pengawasan aparatur Pengawasan Intern pemerintah (APIP) dan pengadilan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penilaian atas permohonan penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam putusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah sebelum proses pidana.

Kesimpulan yang didapat adalah analisis pertimbangan hakim dan putusan PTUN Jambi salah dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan No. 4 Tahun 2015 (Perma No. 4 Tahun 2015) tentang Pedoman Dalam Penilaian Peradilan unsur penyalahgunaan wewenang. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyalahgunaan wewenang baik dari segi pidana maupun aspek administrasi pemerintahan agar tercapai keselarasan peraturan.

KATA KUNCI: Penyalahgunaan Kewenangan, Kerugian Negara, Optimalisasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Abuse of Authority Corruption Under the Government Administration Act

PUTRI SUKMIANI

Abstract

Based on the Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and the Supreme Court regulation have extended the absolute competence of the Administrative Court to examine elements of abuse of authority committed by state officials in carrying out their positions. However, this authority is not the only option given by law in Indonesia, which in addition there is also the authority of the general court to resolve the topic of abuse of authority that causes harm to the country. therefore, there is still ambiguity and overlap in laws related to abuse of authority which causes losses to state finances which ultimately has an impact on legal certainty and justice for related parties. This type of thesis research used normative juridical research that is descriptive. The Data used to answer the problems in this study were secondary data and primary data derived from library research. The results of the study found that the District Administrative Court was authorized to decide related elements of abuse of authority committed by the agency and/or government officials. The analysis of the state administration Case Number: 2/P/PW/2017/PTUN.JBI. not compatible with Perma No. 4 of 2015 because it did not meet the requirements, the new court is authorized to accept, examine, and decide the assessment of the application, after the results of the supervision of the government Internal Audit apparatus (APIP) and the court is authorized to accept, examine, and decide the assessment of the application for assessment of whether or not there was abuse of authority in the decisions and/or actions of government officials before the criminal process. The conclusion obtained was the analysis of the consideration of judges and the decision of the PTUN Jambi was wrong and not in accordance with what was mandated in Regulation No. 4 of 2015 (Perma No. 4 of 2015) on guidelines in the assessment of judicial elements of abuse of authority. It is recommended to the government to harmonize laws and regulations related to abuse of authority both in terms of criminal and administrative aspects of the government in order to achieve regulatory harmony.

KEYWORDS: buse of authority, state losses, optimization of elements of abuse of authority.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak Januari 2022 ini adalah **PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Anter Venus., MA., Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus sebagai Ketua Penguji Ujian Tesis;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan arahan kepada seluruh mahasiswa termasuk penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir;
4. **Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH. MH** Ketua Senat Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta selaku Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan dan saran yang sangat bermanfaat selama bimbingan dan ujian tesis berlangsung;
5. Dr. Handoyo Prasetyo selaku Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan ilmu dan saran yang sangat bermanfaat selama ujian tesis;
6. Para dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang Tua Penulis Ayah H. Burhanuddin, S.H., M.H dan Ibu Hj. Darmiana yang secara ikhlas tanpa pamrih telah membimbing, membesarkan dan menyayangi penulis sejak penulis kecil sampai sekarang penulis bekerja dan berkeluarga;
8. Teristimewa untuk anak – anakku Ratu Alisha Ghassani dan El Fatih Akra yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, do'a dan dukungannya untuk penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini. Merekalah penyemangat penulis;
9. Seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan teman-teman atas do'a dan dukungan yang telah diberikan; serta

10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum terkhusus rekan-rekan konsentrasi Hukum Kenegaraan yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum baik secara teori maupun praktik serta bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin*.

Jakarta, 28 November 2022

Penulis,

PUTRI SUKMIANI

DAFTAR ISI

HALAM SAMBUNG	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
E. Literatur Review	8
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	9
1. Kerangka Teori	9
2. Konsepsi	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Wewenang	15
B. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang	18
1. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara	19
2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana	22
C. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara	24
1. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara	25
2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang yang terindikasi Menimbulkan Kerugian Negara	27
D. Konsep Tindak Pidana Korupsi	29
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29
2. Pengertian Kerugian Negara	31
3. Tanggung jawab hukum terhadap tindak pidana korupsi	32
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Sifat Penelitian	33
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Sumber Bahan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
F. Teknik Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV : PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	37
A. Penyalahgunaan Wewenang Sebagai “Kompetensi Peradilan	

Tata Usaha Negara”	37
1. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara” dalam Penyelesaian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintahan	38
2. Konsep Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	43
B. Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Tindakan Penyalahgunaan Wewenang	45
C. Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI.....	48
1. Pertimbangan hakim terkait unsur menyalahgunakan kewenangan dalam menjatuhkan pidana pada perkara tata usaha negara Nomor: 2/P/PW/2017/PTUN.JBI	48
2. Optimalisasi pengertian menyalahgunakan kewenangan yang dipergunakan oleh Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi Negara / Pemerintahan.....	58
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
RIWAYAT HIDUP	